

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Qaulin Nisak, 2022 Strategi Komunikasi BPBD Provinsi NTB Dalam Mensosialisasikan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Gunungsari Pasca Banjir Tahun 2022	<p>a. Mengetahui strategi komunikasi pada saat sosialisasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB di Kecamatan Gunungsari.</p> <p>b. Mengetahui faktor penghambat BPBD Provinsi NTB dalam melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB di Kecamatan Gunungsari</p>	<p>Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.</p>	<p>1. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB dalam pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana adalah dengan cara : menyusun strategi kebijakan, melakukan sosialisasi, kemudian evaluasi dan terakhir adalah pelaporan.</p> <p>2. Faktor penghambat strategi komunikasi yang dialami oleh BPBD Provinsi NTB dalam proses sosialisasi adalah kapasitas masyarakat dalam penanggulangan</p>

				bencana relative rendah, kemudian terbatasnya sarana serta prasarana kerja dan anggaran untuk sosialisasi dan Komunikasi yang diberikan hanya kepada masyarakat yang terkena bencana dan perlu ditingkatkan kembali kepada masyarakat umum
Linya Ketzia Chlodya Br Tobing, 2022	Strategi Komunikasi BPBD dalam Mensosialisasikan Informasi Bencana Banjir di Kota Binjai	a. Mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Binjai pada saat melakukan sosialisasi kebencanaan b. Mengetahui pandangan, pola pikir ataupun perspektif dari masyarakat Kota Binjai terkait strategi	Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.	1. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Binjai terkait kebencanaan adalah dengan melakukan penyuluhan dan menggunakan media massa dengan menerapkan strategi komunikasi perencanaan, penerapan serta melakukan evaluasi.

		komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Binjai.		2. Perspektif masyarakat Kota Binjai masih tergolong minim terkait strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Binjai.
Muhammad Nurzam, 2023	Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Alam di Kota Parepare	<p>1. Untuk mengetahui program BPBD dalam mitigasi bencana alam di Kota Parepare</p> <p>2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami BPBD Kota Parepare dalam komunikasi mitigasi bencana alam</p> <p>3. Untuk mengetahui strategi komunikasi BPBD dalam mitigasi bencana alam di Kota Parepare</p>	Menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan	<p>1. BPBD Kota Parepare menjalankan program mitigasi bencana alam berupa simulasi, menanam pohon dan sosialisasi. Selain itu terdapat beberapa program lainnya yang terdapat dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana per rawan bencana</p> <p>2. Hambatan yang dialami oleh BPBD Kota Parepare yaitu pendanaan yang minim, kurangnya kesadaran</p>

				<p>masyarakat terhadap mitigasi bencana alam serta kurangnya alat berat yang dapat digunakan pada saat bencana alam</p> <p>3. Strategi komunikasi yang digunakan dalam kegiatan pra bencana adalah melakukan komunikasi dengan instansi lainnya seperti BMKG.</p>
--	--	--	--	---

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait strategi komunikasi mitigasi bencana dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi BPBD serta hambatan yang dihadapi pada saat melaksanakan mitigasi kebencanaan. Oleh karena itu, penelitian terdahulu menjadi acuan penulis pada penelitian ini, karena mencakup wawasan terkait strategi komunikasi bencana. *Gap* pada ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek penelitian. Penelitian kali ini, berbeda dengan penelitian terdahulu dalam 2 (dua) hal, yaitu pilihan penelitian dalam penentuan objek dan tempat penelitian. Dari uraian diatas, diharapkan memberikan kontribusi dalam menjadikan referensi pada proses penelitian.

2.2 Strategi Komunikasi

2.2.1 Definisi Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan panduan untuk mencapai tujuan dalam organisasi atau lembaga dengan cara membuat perencanaan komunikasi serta manajemen komunikasi. Menurut Rogers (Cangara 2014) dijelaskan bahwa strategi komunikasi adalah rancangan yang disusun atau dibuat dengan tujuan

untuk dapat merubah perilaku atau perangai manusia dengan skala yang besar dengan menggunakan cara mentransfer ide-ide baru.

Sedangkan menurut Middleton (Cangara 2014) menjelaskan bahwasanya strategi komunikasi terdiri dari kombinasi atau gabungan dari unsur-unsur dari komunikasi seperti komunikator, pesan, media atau saluran penerima atau komunikan, serta efek dengan tujuan untuk dapat mencapai suatu komunikasi yang optimal.

Definisi lain dari strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Smith (Solomo and Kartikawangi 2022) adalah gabungan tahapan-tahapan komunikasi yang diawali dengan tahapan perencanaan atau planning serta manajemen komunikasi yang berisi implementasi dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ely D.Gomez (Cangara 2014) menjelaskan bahwa strategi komunikasi selalu dikaitkan dengan kebijakan komunikasi karena kebijakan komunikasi merupakan perancangan strategi dalam jangka yang panjang dan harus diuraikan pada perancangan operasional.

Terdapat dua fungsi ganda dari strategi komunikasi yang dijelaskan oleh Effendi adalah:

1. Untuk dapat menyampaikan suatu pesan atau informasi yang disampaikan kepada target untuk mendapatkan hasil yang optimal, dengan cara yang informatif, persuasif serta instruktif dengan sistem yang terstruktur.
2. Sebagai pen jembatan di sebuah perbedaan budaya / *culture gap*. Fungsi komunikasi ini adalah untuk memudahkan target untuk mendapatkan informasi serta kemudahan media, dan apabila hal ini dapat dibiarkan akan terjadi sebuah kerusakan dengan nilai-nilai yang telah dibangun (Munawi et al. 2018).

2.2.2 Tujuan Strategi Komunikasi

Dalam strategi komunikasi terdapat beberapa tujuan-tujuan yang ingin dicapai di dalamnya, menurut Wayne Pace, dkk (Onong Uchjana Effendy 2003) tujuan-tujuan strategi komunikasi diantaranya adalah:

1. *To Secure Understanding*

Dalam komunikasi diperlukan adanya pemahaman yang benar agar dapat memastikan bahwa dalam komunikasi terjadi adanya pengertian. Pengertian antar dua orang sangat diperlukan dalam berkomunikasi.

2. *To Establish Acceptance*

Strategi komunikasi disusun berdasarkan tujuan untuk dapat saling memahami dan pemahaman tersebut dapat terjalin dengan baik dan selaras.

3. *To Motivate Action*

Tujuan dari strategi komunikasi agar dapat memberikan motivasi lebih atau dorongan melalui perilaku atau aksi. Diharapkan dari suatu komunikasi untuk dapat memberikan pengaruh atau dapat merubah perilaku komunikan (audiens) berdasarkan keinginan dari komunikator itu sendiri.

4. *To the Goals Which the Communicator Sought to Achieve*

Tujuan dalam berkomunikasi harus jelas. Jika seorang komunikator memiliki tujuan jelas yang hendak dicapai, proses komunikasi akan selaras dengan tujuan tersebut. Dengan tujuan sentral tersebut strategi komunikasi dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah disepakati oleh suatu kelompok atau golongan. Sehingga komunikator pada saat menyampaikan suatu pesan, membuat tatanan berbicara akan tertata dengan baik dan benar.

2.2.3 Langkah-Langkah dalam Menyusun Strategi Komunikasi

Dalam perencanaan strategi komunikasi, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan seperti mengenal target audiens, menyusun pesan serta penentuan metode dalam penyampaian suatu pesan atau informasi (Salomo and Dorien Kartikawangi 2022).

Sedangkan menurut Fajar dalam merancang strategi komunikasi diperlukan 4 faktor, yaitu: (Fajar 2009)

1. Mengetahui publik atau target audiens

Komunikator harus dapat melakukan komunikasi yang efektif. Hal ini agar terjadi komunikasi yang aktif antara komunikator dengan publik atau target audiens. Sehingga diharapkan terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara komunikator dengan komunikan (publik atau target audiens). Agar dapat terjadi hubungan saling mempengaruhi, komunikator perlu mengenal atau mengidentifikasi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa faktor, seperti: psikografis serta demografis. Selain itu, komunikan

dapat melakukan identifikasi publik atau target audiens dengan cara keterlibatan atau penggunaan (relevansi) publik terhadap suatu pesan atau informasi yang akan disampaikan.

2. Menyusun Pesan

Pesan merupakan segala aspek yang dapat diartikan dengan bentuk simbol, kemudian dipersepsikan oleh publik atau target audiens dengan disampaikan melalui media. Pesan dapat mempengaruhi publik atau target audiens adalah dengan cara membuat perhatian. Sehingga pesan komunikasi efektif yang diterima oleh komunikan adalah komunikasi yang dapat menarik perhatian. Pernyataan ini sesuai dengan *from attention to action procedure*, sehingga dapat menggairahkan perhatian / *attention* agar selanjutnya khalayak atau publik dapat bergerak untuk melakukan aksi / *action* berdasarkan tujuan yang telah direncanakan. Dalam penyampaian pesan atau informasi, komunikator harus melakukan pendekatan yang relevan digunakan kepada komunikan. Pendekatan pesan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan: *rational appeal*, *emotional appeal* dan kombinasi dari kedua pendekatan.

3. Menentukan Metode

Metode penyampaian dalam komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 aspek: (1) berdasarkan aspek pelaksanaannya, yaitu pengklasifikasian komunikasi dari cara pelaksanaannya serta bagaimana pesan komunikasi tersebut dilepaskan; (2) berdasarkan isi pesan komunikasi komunikasi dengan melihat komunikasi dari suatu pernyataannya atau isi pesan atau informasi tersebut serta kandungan dari pesan tersebut.

Pengklasifikasian komunikasi berdasarkan aspek pelaksanaannya dibagi dalam dua cara, yaitu:

- a) Metode *Redundancy* yaitu metode yang dilakukan untuk mempengaruhi publik atau target audiens dengan cara pesan yang disampaikan kepada publik dilakukan dengan cara diulang-ulang. Pesan yang diulang-ulang akan dapat menarik perhatian karena pesan tersebut akan dapat mudah diingat oleh khalayak. Pada metode ini komunikator dapat melakukan perbaikan dalam penyampaian pesan pada kesempatan berikutnya.

- b) Metode *Canalizing* pada metode ini, seorang komunikator akan lebih dulu mengenali publiknya, sehingga dalam penyampaian pesan akan dapat menyesuaikan pesan tersebut dengan kepribadian, sikap sikap hingga motif dari publik atau target audiens.

Sedangkan berdasarkan isi pesan komunikasi, metode komunikasi dapat dibagi menjadi:

- a) Metode informatif merupakan metode yang biasa digunakan di komunikasi media massa. Metode ini berisikan pesan yang memiliki tujuan agar dapat mempengaruhi publik dengan cara memberikan pemahaman atau pengertian. Cara yang digunakan dalam metode ini adalah dengan mengedepankan pesan yang informatif, faktual atau apa adanya dengan memberikan fakta-fakta, data-data serta pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- b) Metode edukatif merupakan metode penyampaian pesan dengan tujuan untuk dapat merubah perilaku publik. Isi pesan atau informasi berisikan pendapat, fakta dan juga pengalaman yang dapat dibuktikan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c) Metode koersif merupakan metode komunikasi yang memiliki cara mempengaruhi publik dengan paksaan terhadap isi pesan, yang berisikan gagasan atau ide. Pada metode ini, pesan komunikasi memiliki isi tentang pendapat dan juga ancaman.
- d) Metode persuasif merupakan metode komunikasi untuk mempengaruhi publik, namun publik tidak perlu berpikir kritis sehingga publik dapat dipengaruhi dengan mudah oleh komunikator.

4. Pemilihan Media Komunikasi

Media menjadi salah satu aspek penting yang berkaitan dengan ketersampaian sebuah pesan kepada khalayak atau publik yang dituju. Media dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu media lini atas (*above the line*) dan media lini bawah (*below the line*). Media lini atas merupakan media utama sebagai media untuk penyampaian sebuah pesan. Penggunaan media lini atas biasanya sebagai media dengan alokasi dana terbanyak. Media lini bawah (*below the line*) adalah media dengan harga yang rendah dan digunakan untuk penunjang media utama. Dalam penentuan media yang

baik adalah penggunaan media yang didasari efektivitas dengan memperhatikan penggunaan media sesuai dengan target khalayak atau publik yang dituju.

Strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang terstruktur dan memiliki arah dalam penyampaian suatu pesan dengan memiliki tujuan tertentu. Dalam konteks mitigasi bencana, strategi komunikasi bencana memiliki peranan untuk melakukan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah rawan bencana mengenai pengetahuan akan potensi risiko bencana, upaya mitigasi dan upaya dalam mengurangi risiko bencana. Tujuan dari penyusunan strategi komunikasi mitigasi bencana adalah untuk memastikan informasi terkait mitigasi kebencanaan dapat tersebar luas secara efektif dan dapat diterima serta mendapatkan respons yang baik oleh masyarakat agar dapat mengajak masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana (BPBD Provinsi Bali 2023).

2.3 Mitigasi Bencana

2.3.1 Definisi Mitigasi Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 definisi mitigasi adalah serangkaian upaya dalam meminimalisir risiko dampak dari suatu bencana. Lebih lanjut definisi mitigasi menurut Joko mitigasi merupakan rangkaian upaya atau usaha untuk mengurangi dampak resiko dari bencana dengan melakukan pembangunan fisik serta dapat meningkatkan kesadaran atau kemampuan masyarakat di wilayah terdampak dalam menghadapi ancaman bencana (Arofah and Puspaningtyas 2023).

Suatu bencana dapat menimbulkan adanya risiko atau bahaya yang terjadi, dampak risiko yang terjadi diantaranya adalah adanya korban jiwa manusia, kerusakan-kerusakan pada lingkungan, hilangnya harta dan benda, serta dampak risiko yang terjadi pada psikologis yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006, terdapat 4 hal yang penting pada saat mitigasi bencana, yaitu:

- a) Tersedianya informasi yang berisikan peta rawan bencana yang dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis bencana;

- b) Sosialisasi untuk tujuan agar dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman dari masyarakat untuk dapat menghadapi terjadinya bencana alam;
- c) Masyarakat mampu memahami cara-cara untuk dapat menyelamatkan diri apabila terjadi suatu bencana dengan memahami hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari;
- d) Perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana untuk dapat mengurangi dampak dari ancaman bencana.

Dalam upaya untuk mengurangi atau meminimalisir dampak dari bencana alam diperlukan adanya upaya mitigasi. Menurut Coppola dijelaskan terdapat dua jenis mitigasi, yaitu; (Laily et al. 2022)

1. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalisir dampak risiko bencana dengan melalui beberapa cara seperti membuat perencanaan pembangunan atau perubahan pada lingkungan fisik (bangunan). Upaya mitigasi struktural dilakukan dengan cara membangun ketahanan pada konstruksi, melakukan relokasi dan memodifikasi struktur bangunan tempat tinggal bagi masyarakat. Serta membuat sistem pendeteksi, sistem pemulihan dan penanggulangan infrastruktur yang layak untuk keselamatan serta keamanan hidup masyarakat. Contoh mitigasi struktural adalah pembuatan waduk atau kanal banjir atau dengan membangun bangunan tahan gempa. Selain itu dalam hal mitigasi struktural teknologi dapat dilakukan dengan alat yang dapat memprediksi gunung meletus.

2. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural merupakan cara untuk mengurangi dampak risiko dari suatu bencana dengan cara melalui tahapan-tahapan pada perilaku manusia dan alam yang berubah. Tujuan pada kegiatan mitigasi non struktural ini adalah meningkatnya pemahaman serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi adanya ancaman suatu bencana. Pada mitigasi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan regulasi, program pendidikan serta dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bencana. Menurut Indarti & Yosa

(Murdani and Mujahidin 2023) menjelaskan bahwa dalam beberapa penelitian menunjukkan mitigasi non-struktural lebih memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi serta memiliki nilai keberlanjutan yang baik. Fakta tersebut dikarenakan mitigasi non-struktural selalu melibatkan masyarakat secara langsung sebagai objek serta sebagai subjek utama dalam pengurangan risiko bencana.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 terkait kebijakan mitigasi bencana mencakup:

- a) Upaya mitigasi bencana harus membentuk suatu pemahaman yang sama antara semua pihak terkait yang terdiri dari aparat pemerintah hingga seluruh unsur-unsur yang ada di masyarakat. Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan pengaturan prosedur yang berisikan penjelasan tentang langkah-langkah yang diatur pada pedoman umum, petunjuk pelaksanaan serta prosedur tetap yang nantinya dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing.
- b) Pengimplementasian mitigasi bencana harus dilakukan dengan selaras serta terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut perlunya adanya keterlibatan dari seluruh potensi dan unsur-unsur pemerintah serta masyarakat.
- c) Dalam mitigasi bencana, langkah-langkah preventif sangat perlu ditekankan untuk tujuan meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari bencana alam.
- d) Diperlukan adanya konsolidasi atau penggalangan kekuatan agar didapati kerjasama dari seluruh pihak dan dapat melibatkan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan mitigasi bencana perlu adanya strategi mitigasi, menurut Aulia Fadhil, menjelaskan terkait strategi dalam mitigasi bencana, diantaranya adalah: (Fadhli 2019)

a. Pemetaan

Langkah pertama dalam strategi mitigasi adalah dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan masing-masing kebencanaan. Dengan menggunakan peta rawan bencana akan dapat memudahkan dalam mengambil keputusan dalam hal mengantisipasi adanya kejadian bencana alam.

b. Pemantauan

Untuk mengetahui tingkatan risiko secara dini, maka diperlukan antisipasi apabila bencana alam dapat terjadi sewaktu-waktu.

c. Penyebaran Informasi

Pemerintah yang berada di daerah seperti kabupaten, kota maupun provinsi memiliki peranan untuk dapat menyebarkan informasi kebencanaan yang meliputi bagaimana cara mengenali, mencegah dan juga penanganan pada suatu bencana apabila terjadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penyebaran suatu pesan atau informasi kebencanaan adalah dengan cara menggunakan media-media, baik media cetak maupun media elektronik. Tujuannya adalah masyarakat pada wilayah tersebut dapat meningkatnya pemahaman serta kesiapsiagaan.

d. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan terkait kebencanaan dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja.

e. Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan Pendidikan pada mitigasi bencana dilakukan dengan cara memfokuskan kegiatan terkait penyelamatan atau evakuasi diri serta tata cara pengungsian. Tujuan pada pelatihan dan pendidikan mitigasi bencana ini adalah menjelaskan alur informasi dan koordinasi dari petugas lapangan, pejalan teknis, relawan dan juga masyarakat itu sendiri yang dilakukan hingga masyarakat sampai di pengungsian.

f. Peringatan Dini

Peringatan dini adalah memberitahukan kepada masyarakat hasil pengamatan secara bertahap di suatu daerah rawan bencana dengan tujuan agar

dapat mengantisipasi dan meminimalisir potensi risiko apabila terjadi bencana. Peringatan dini tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan berisikan saran teknis berupa pengalihan jalur evakuasi, pengungsian serta relokasi dan juga penanganan lainnya.

2.3.2 Tujuan Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan rangkaian upaya yang dilaksanakan pada saat pra bencana. Menurut Undang-Und Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat (1) tujuan dari dilaksanakannya kegiatan mitigasi adalah untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana karena suatu bencana.

Sedangkan menurut Prastowo dan Wahyuningsih (Dewi 2023) tujuan dari mitigasi adalah untuk dapat menurunkan dampak risiko dari bencana dengan cara meningkatkan kesadaran serta pengembangan kesiapan fisik dari adanya potensi bahaya.

Tujuan mitigasi menurut Sigit Sapto Nugroho dibagi menjadi 3 yaitu: (S. S. Nugroho, Haq, and Erwin 2020)

1. Untuk dapat mengurangi resiko timbulnya korban-korban cedera dan korban akibat dari bencana.
2. Untuk dapat mengurangi dampak kerusakan serta kerugian ekonomi berupa infrastruktur yang dapat ditimbulkan karena bencana.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi suatu bencana alam, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman.

2.4 Penanggulangan Bencana

2.4.1 Definisi dan Asas Penanggulangan Bencana

Definisi penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (5) adalah serangkaian upaya yang terdiri dari penetapan kebijakan pembangunan yang memiliki resiko timbul atau terjadinya suatu bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi.

Penanggulangan bencana adalah upaya yang dilakukan dengan cara

dinamis yang dilakukan dengan mengembangkan fungsi manajemen yang meliputi dari perencanaan/planning, pengorganisasian, pembagian tugas, pengawasan serta pengendalian pada proses penanggulangan bencana. Pada proses atau upaya penanggulangan bencana perlu adanya keterlibatan seluruh pihak dari pemerintah atau instansi terkait hingga masyarakat agar melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga proses pemulihan atau rehabilitasi akibat bencana alam. (KPUPR 2017)

Sehingga, diperlukan pemahaman bersama oleh semua pihak yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, hal ini dituangkan dalam beberapa prinsip-prinsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

1. Cepat dan Akurat

Prinsip cepat dan akurat adalah prinsip dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan pada kondisi tertentu dengan melaksanakan secara cepat dan tepat.

2. Prioritas

Prinsip prioritas dalam penanggulangan bencana dilaksanakan apabila terjadi suatu bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus diprioritaskan atau diutamakan karena termasuk kegiatan atau upaya dalam menyelamatkan nyawa masyarakat.

3. Koordinasi

Prinsip koordinasi dalam penanggulangan bencana dilakukan dengan saling berkoordinasi yang baik dan dapat saling mendukung.

4. Keterpaduan

Prinsip keterpaduan dalam penanggulangan bencana adalah adanya kerjasama serta saling mendukung antara beberapa pihak yang terkait yang terdiri dari berbagai macam bidang dalam upaya penanggulangan bencana.

5. Berdaya Guna

Prinsip berdaya guna dalam penanggulangan bencana dengan tujuan untuk mengatasi persoalan atau kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Pada prinsip ini dilakukan dengan cara manajemen waktu, tenaga, serta

biaya agar tidak terbuang berlebihan serta tidak tepat sasaran.

6. Berhasil Guna

Prinsip berhasil guna merupakan prinsip dalam penanggulangan bencana untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat tanpa membuang waktu, tenaga serta biaya yang terbuang berlebihan dan tidak tepat sasaran.

7. Transparansi

Prinsip transparansi merupakan prinsip dalam upaya dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan cara yang transparan atau terbuka dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

8. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam penanggulangan bencana adalah semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan dengan terbuka serta mampu dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

9. Kemitraan

Prinsip kemitraan merupakan kerja secara bersama sama dengan mengutamakan kepentingan bersama dengan persamaan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan secara bersama.

10. Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan merupakan upaya untuk melibatkan seluruh pihak dari instansi pemerintah hingga masyarakat dalam penanggulangan bencana.

11. Non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi dalam penanggulangan bencana dilakukan dengan cara tidak memperlakukan masyarakat dengan membeda-bedakan baik secara jenis kelamin, suku, agama, ras bahkan aliran politik yang berbeda-beda pada masyarakat.

12. Non-proletisi

Prinsip non-proletisi merupakan alasan penyebaran agama atau kepercayaan kepada masyarakat pada saat terjadinya keadaan darurat bencana.

Asas-asas yang digunakan dalam penanggulangan bencana termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencanayang berisikan:

1. Asas kemanusiaan, terwujud dalam adanya memenuhi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seluruh masyarakat di Indonesia pada saat penanggulangan bencana.
2. Asas keadilan dalam penanggulangan bencana, bahwa keadilan diberikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia harus seimbang tanpa membeda-bedakan.
3. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, semua masyarakat harus dianggap sama tanpa membeda-bedakan berdasarkan latar belakang, suku, agama, ras, golongan, gender ataupun status sosial lainnya.
4. Asas keseimbangan dalam penanggulangan bencana, harus memperhatikan keseimbangan pada aspek sosial dan lingkungannya.
5. Asas keselarasan dalam penanggulangan bencana, harus mempertimbangkan ada keselarasan pada lingkungan dengan kehidupan sosial dari masyarakat.
6. Asas keserasian dalam penanggulangan bencana, harus mencerminkan adanya keserasian antara lingkungan dan juga aspek sosial dari masyarakat
7. Asas keterlibatan dan kepastian hukum dalam penanggulangan bencana, haruslah berisi terkait terciptanya ketertiban pada masyarakat berdasarkan jaminan pada kepastian hukum.
8. Asas kebersamaan dalam penanggulangan bencana, secara tegas bencana adalah tanggungjawab bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan bersama-sama secara gotong royong.
9. Asas kelestarian lingkungan hidup dalam penanggulangan bencana, harus mencerminkan asas kelestarian lingkungan yang memiliki tujuan untuk melestarikan lestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya.
10. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan optimal agar dapat memudahkan proses-proses penanggulangan bencana yang baik pada tahap pencegahan, pada saat tanggap darurat dan juga pada saat pasca bencana.

2.4.2 Tahapan Penanggulangan Bencana

Upaya implementasi dari manajemen penanggulangan bencana, harus meliputi 3 (tiga) tahapan, berikut adalah tahapan tahapan penanggulangan bencana:

- 1) Tahapan pra-bencana: dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan adanya potensi akan terjadinya bencana.
- 2) Tahapan tanggap darurat: dilaksanakan dan diterapkan pada saat terjadinya suatu bencana.
- 3) Tahapan pasca bencana yang dilaksanakan pada saat setelah terjadinya suatu bencana.

Menurut Muhammad Danil terdapat 3 (tiga) manajemen bencana dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, yaitu: (Muhammad Danil 2021)

1) Manajemen Risiko Bencana

Manajemen risiko bencana merupakan manajemen bencana yang ditekankan pada faktor-faktor yang bertujuan untuk mengurangi resiko pada saat sebelum terjadinya suatu bencana. Manajemen risiko bencana ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (Radani and Hasbiyah 2024)

- Pencegahan bencana merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk upaya menghilangkan atau mengurangi ancaman suatu bencana.
- Mitigasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk upaya mengurangi risiko dari bencana, baik dengan cara pembangunan fisik (struktural) maupun peningkatan kemampuan menghadapi sebuah ancaman bencana (non-struktural)
- Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya antisipasi kebencanaan melalui pengorganisasian dan melalui langkah langkah yang tepat. Kesiapsiagaan merupakan fase untuk memberikan peringatan kepada masyarakat atau publik tentang

kemungkinan akan terjadinya bencana pada suatu tempat yang informasi tersebut disampaikan oleh instansi pemerintah terkait.

2) Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan merupakan upaya dalam penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban jiwa yang terdampak akibat bencana alam, serta penanganan kepada pengungsi saat terjadi bencana. Pengklasifikasian manajemen kedaruratan berdasarkan fase kebencanaan: (Kadarusno, Maryana, and Achamad Husein 2022)

- Tanggap darurat merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk segera pada saat terjadinya bencana sehingga dapat menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana. Dampak buruk tersebut meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, perawatan pengungsi, penyelamatan hingga.

3) Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan merupakan serangkaian kegiatan untuk upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat membuat mengembalikan kondisi atau keadaan pada masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena akibat bencana dengan cara memfungsikan kembali sarana dan prasarana serta lembaga lembaga secara menyeluruh setelah terjadinya suatu bencana dengan fase-fase sebagai berikut: (Muhammad Danil 2021)

- Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan kembali semua aspek pelayanan masyarakat untuk kembali menormalkan jalannya aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada saat pasca bencana.

- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana fisik, aspek-aspek pemerintahan yang berada di wilayah pasca bencana. Dengan tujuan utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya hingga membangkitkan kembali segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

2.4.3 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan terkait penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dapat diklasifikasikan berdasarkan situasi, meliputi:

- Dalam situasi tidak terjadinya suatu bencana; serta
- Dalam situasi terdapat potensi adanya bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadinya suatu bencana, diatur dalam pasal 35 huruf a sampai h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang meliputi:

- a) Perencanaan penanggulangan bencana;
- b) Pengurangan risiko bencana;
- c) Pencegahan;
- d) Pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e) Persyaratan analisis risiko bencana;
- f) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g) Pendidikan serta pelatihan; dan
- h) Persyaratan standar dalam teknis penanggulangan bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi adanya bencana, dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang meliputi:

- a) Kesiapsiagaan merupakan dipastikannya serangkaian upaya yang cepat dan juga tepat dalam menghadapi suatu bencana.
- b) Peringatan dini merupakan pengambilan tindakan yang cepat serta tepat dalam rangka untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana dan juga mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- c) Mitigasi bencana merupakan pengurangan resiko bencana yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah kawasan rawan bencana.